



LAKIP 2024

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PURWAKARTA**

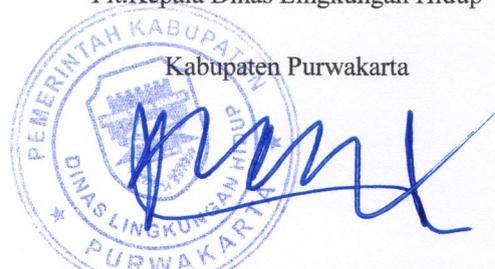
KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatNya, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta merupakan sarana perjanjian kinerja dalam rangka mengimplementasikan system akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Clean Government dan Good Governance. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja.

Purwakarta, Desember 2024

Plt.Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Purwakarta



H. DICKY DARMAWAN.,SH.,M.Hum

NIP. 196705021992031009



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan adil dan makmur bagi rakyat tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*) atau dikenal juga dengan **Pembangunan Berwawasan Lingkungan** adalah menjadi tujuan utama pembangunan dalam bidang lingkungan hidup.

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan, dengan maksud agar generasi mendatang dapat menikmati kualitas dan kuantitas sumber daya alam yang baik sebagaimana yang kita nikmati sekarang, sehingga kita tidak mewariskan kerusakan dan pencemaran kepada generasi penerus. Secara filosofis pembangunan berkelanjutan memiliki makna saling menghormati dan menghargai, artinya pembangunan diarahkan untuk tetap memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang. Hal ini menjadi rambu-rambu bagi manusia agar tetap menjaga keseimbangan alam, karena menyadari akan keterbatasannya, semakin manusia membutuhkan alam akan terasa keterbatasannya.

Memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, akan mengevaluasi kinerja selama tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026 sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugasnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* dalam perspektif yang lebih luas, LAKIP juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh Lembaga Pemerintah Daerah, serta partisipasi / peran serta masyarakat. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam mewujudkan lembaga yang berkinerja baik.

I.2 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 241 Tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - ❖ Perencana Ahli Muda Sub sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan;
 - ❖ Ka.Sub Bagian Keuangan;
 - ❖ Ka.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
 - ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
 - ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
 - ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi :
 - ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
 - ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
 - ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi :
 - ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;

- ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
- ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda.

6. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi :

- ❖ Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda;
- ❖ Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda;
- ❖ Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda.

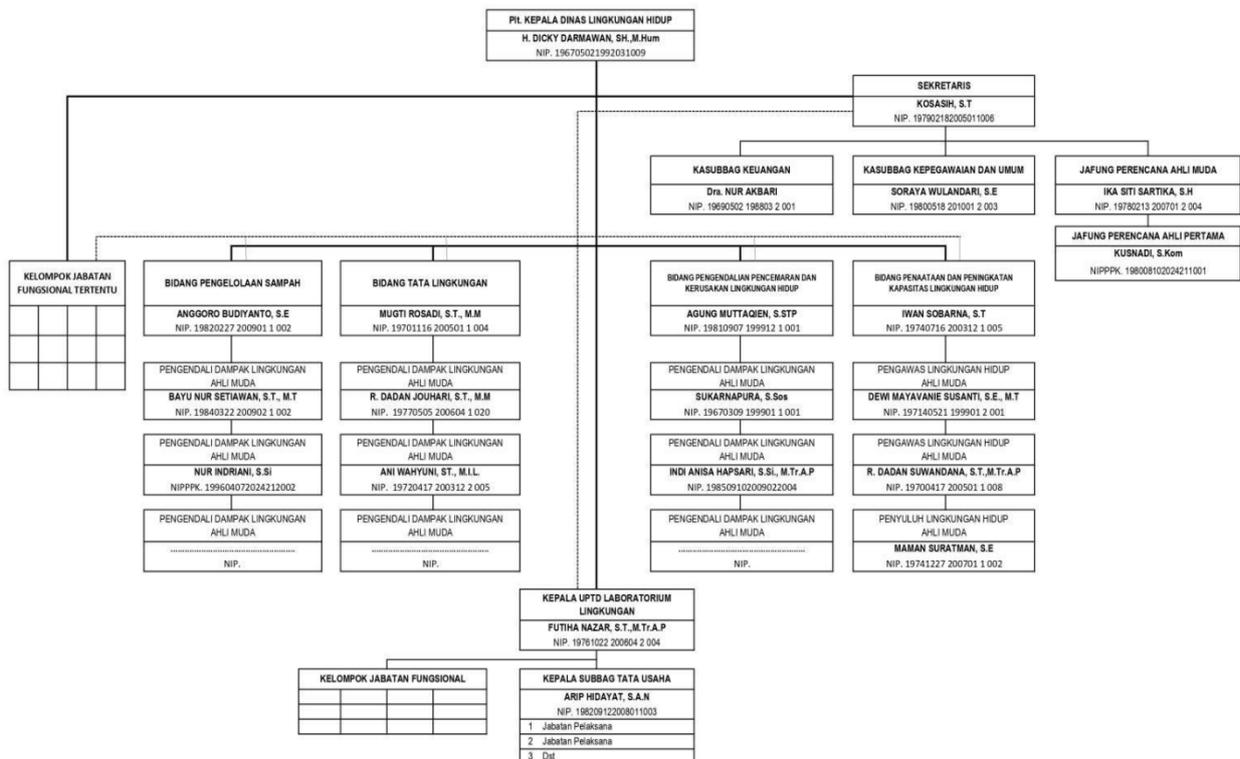
7. Kepala UPTD Laboratorium

- ❖ Kepala Subbag Tata Usaha

8. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA

Sesuai Peraturan Bupati Purwakarta
 Nomor : 36 Tahun 2023
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
 Dinas Lingkungan Hidup



Selanjutnya sebagai Dasar Hukum Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta diatur dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor.36 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta melaksanakan Tugas Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terdapat pada Lampiran I. Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.

➤ **Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup**

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diantaranya adalah kewenangan urusan wajib yang harus dikelola daerah Kabupaten/Kota yaitu salah satunya Urusan di Bidang Lingkungan Hidup, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016, dimana salah satu isinya adalah pembentukan lembaga teknis yang mengurus pengelolaan lingkungan hidup di daerah yaitu berbentuk Dinas Lingkungan Hidup.

Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten Purwakarta di Dinas Lingkungan Hidup. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
- b) Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup;
- c) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
- d) Pelaksanaan Administrasi Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; dan
- e) Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Lingkup Tugas dan Fungsinya.

Untuk menjalankan tugasnya dalam menyediakan data sebagai indikator baik dalam hal perencanaan maupun evaluasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta senantiasa memperhatikan komposisi SDM sehingga apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi yang diemban dapat

dilaksanakan dengan baik. Dibawah ini disajikan tabel berkenaan dengan pegawai Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta disajikan pada Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Data Pegawai Tahun 2024
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta

No	Uraian	Jumlah Pegawai
1	2	3
1	Pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan :	
	1. SD	22
	2. SMP	20
	3. SMA	40
	4. Sarjana Muda (D1 – D3)	-
	5. S 1 dan D 4	20
	6. S 2	10
	Jumlah	112 Orang
2	Pegawai berdasarkan pangkat/golongan :	
	1. Golongan I	15
	2. Golongan II	51
	3. Golongan III	35
	4. Golongan IV	9
	5. PPPK	2
	Jumlah	112 orang
3	Pegawai berdasarkan jabatan :	
	1. Eselon II	1
	2. Eselon III	5
	3. Eselon IV	4
	4. Jafung	13
	5. Staf	89

	Jumlah	112 orang
4	1. Pegawai Tenaga Tetap	44

I.3 ASPEK STRATEGIS DAERAH DAN PERMASALAHAN UTAMA

I.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Oleh karena itu, strategis dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah. Perencanaan yang baik disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata keseluruhan masyarakat dapat terwujud. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dalam menciptakan nilai, di lain pihak, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hasil rumusan strategi dan arah kebijakan berdasarkan masukan dari komponen masyarakat disajikan pada Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2

Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan

Visi : PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH			
Misi : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Pengelolaan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan hidup

Visi : PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH			
Misi : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Menerapkan rencana pembangunan berbasis ramah lingkungan
			Memperluas penyediaan ruang terbuka hijau
			Meningkatkan pengembangan pengelolaan dan pelayanan persampahan
			Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan masyarakat sadar dan peduli Lingkungan.

Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta pada tujuan meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup lebih ditingkatkan pada aspek pelestarian lingkungan hidup, pembangunan berbasis ramah lingkungan, penyediaan ruang terbuka hijau dan pengembangan pengelolaan dan pelayanan persampahan.

Isu strategis penyebab kerusakan lingkungan di wilayah Purwakarta sebagian besar berasal dari alih fungsi lahan. Pemanfaatan lahan menjadi dilematis dengan perkembangan penduduk yang semakin pesat, lahan pertanian yang dahulunya sangat luas dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi menjadi terbatas karena tuntutan kebutuhan lahan untuk perkembangan lahan sector industri, jasa dan property yang semakin meningkat. Pada tatanan tradisi di Jawa Barat ada pepatah dalam bahasa sunda yang merupakan penggunaan tata guna lahan dari wilayah atas sampai wilayah pesisir yaitu :

“Gunung kaian, pasir talunan, sampalan kebonan, gawir awian, daratan imahan, susukan caian, legok balongan, walungan rawateun, dataran sawahan, basisir jagaeun“.

Yang artinya (*gunung kaian*) gunung harus penuh kayu-kayuan merupakan hutan, (*Pasir talunan*) bukit – bukit harus dikelola untuk hutan dan kebun, (*sampalan kebonan*) antara bukit dan gunung dikelola untuk kebun, (*gawir awian*) pada wilayah jurang-jurang atau yang terjal harus terjaga tanaman bambunya, (*daratan imahan*) daerah yang tidak berbukit dan struktur tanahnya kurang subur diperuntukan untuk rumah, (*susukan caian*) sungai kecil harus berair berarti mata air harus tetap ada, (*susukan caian*) daerah yang cekung harus menjadi penampungan air berupa situ – situ (*balong*) untuk budidaya ikan, (*walungan rawateun*) sungai besar sebagai penampung air dari sungai-sungai kecil harus dipelihara agar bisa memberikan sumber air ke wilayah lain dibawahnya, (*dataran sawahan*) wilayah yang landai dan cukup luas diperuntukan untuk lahan pertanian basah, dan (*basisir jagaeun*) pesisir pantai perlu dijaga untuk keseimbangan dari wilayah laut agar tidak terjadi kerusakan pada wilayah daratan. Bahwa tatanan ini mungkin sudah tidak dikenal, ataupun dilupakan. Bahkan prinsip kearifan lokal seperti ini sudah banyak yang ditinggalkan, sehingga kita saat ini secara tidak langsung sedang menunggu kehancuran lingkungan disekitar kita.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas lingkungan Hidup berdasarkan tugas pokok dan fungsi, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bidang Penaatan dan Kapasitas Lingkungan Hidup

- a. Masih rendahnya intensitas pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam perizinan berusaha;
- b. Kurangnya sumberdaya manusia, sarana, dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa Lingkungan, penegakanhukum Lingkungan, serta peningkatan kapasitas Lingkungan hidup;
- c. Belum meratanya pelaksanaan Pendidikan Lingkungan hidup bagi masyarakat;

2. Bidang Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia secara kuantitas dan perlu pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kompetensi teknis di bidang lingkungan;

- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia sebagai pengelola administrasi data lingkungan;
- c. Lemahnya pengembangan kapabilitas dinamis dalam bentuk bimbingan teknis dan supervisi dalam bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi antar bidang dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- e. Rendahnya tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat dan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan;
- f. Masih perlu adanya sinergitas antara perencanaan dan penganggaran agar seluruh rencana bisa berjalan dengan baik;
- g. Masih diperlukannya tambahan dan penguatan sarana dan prasarana terutama untuk mengintegrasikan data dan informasi;

3. Bidang Tata Lingkungan

- a. Masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sehingga masih banyak desa yang belum mengikuti program kampung iklim;
- b. Keterbatasan data sumber daya alam/sumber mata air yang akurat sesuai kondisi di lapangan;
- c. Menurunnya daya dukung daya tampung di wilayah Kabupaten Purwakarta yang diakibatkan tekanan dinamika jaman;
- d. Perlu ditingkatkan cakupan ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Purwakarta guna mengejar indeks tutupan lahan yang semakin menurun;
- e. Menurunnya pola kearifan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kelestarian lingkungan baik dipedesaan maupun perkotaan;
- f. Masih ada pelaku usaha yang belum mempunyai izin pengelolaan dan pemantauan Lingkungan;
- g. Belum optimalnya penerapan UKL-UPL dan RKL-RPL;
- h. Kabupaten Purwakarta belum mempunyai *masterplan* Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);

4. Bidang Persampahan

- a. Roadmap Kebijakan Teknis Pengelolaan Kebersihan dan Angkutan Persampahan belum tersusun dengan baik dikarenakan kekurangan SDM di Sub-substansi Pengelolaan Kebersihan dan Angkutan Persampahan;

- b. Pengangkutan Sampah masih kurang maksimal dari Tempat Penampungan Sampah Sementara ke Tempat Pemrosesan Akhir sampah, dikarenakan Keterbatasan unit/jumlah Kendaraan Angkutan Persampahan dan SDM dari awak Kendaraan Angkutan Persampahan itu sendiri;
- c. Masih minimnya alokasi pagu anggaran untuk pemenuhan kebutuhan pengadaan dan penyediaan sarpras Pengelolaan Kebersihan dan Angkutan Persampahan, sehingga pelayanan kurang maksimal;
- d. Minimnya koordinasi dalam penetapan lokasi TPS, sehingga tumpukan sampah masih dapat ditemui tertumpuk di pinggir jalan;
- e. Minimnya koordinasi dengan pihak swasta dalam pengangkutan sampah organik dan non organik;
- f. Belum adanya aplikasi retribusi yang memadai;
- g. Belum lengkapnya sarana prasarana retribusi;
- h. Program digitalisasi belum sempurna;
- i. Sarana prasarana mobil/kendaraan sedot tinja kurang baik roda empat atau roda tiga (cator tinja);
- j. Instalasi pengolahan limbah tinja sudah tidak layak pakai/harus di renovasi;
- k. Pembinaan kepada petugas retribusi;
- l. Sarana prasarana petugas retribusi;
- m. Belum adanya jembatan timbang, sehingga data volume sampah yang masuk ke TPA belum dapat di pastikan angkanya;
- n. Akses jalan menuju zona buang rusak, sehingga menyulitkan proses pembuangan sampah;
- o. Pengolahan air lindi belum maksimal;

5. UPTD Laboratorium

- a. Masih terbatasnya anggaran untuk operasional laboratorium dan penunjang akreditasi laboratorium;
- b. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten;
- c. Masih terbatasnya parameter terakreditasi;
- d. Belum ter-registrasi sebagai laboratorium Lingkungan;
- e. Sarana dan prasarana laboratorium belum optimal.

I.4 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2011 – 2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2023 Tentang APBD 2024;
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen LAKIP Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Struktur Organisasi dan tata Kerja
- I.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama
- I.4 Landasan Hukum
- I.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- II. 1 Rencana Strategis
- II.2 Rencana Kinerja
- II.3 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- III.1 Capaian Kinerja Organisasi
 - a. Perbandingan target dan realisasi tahun ini
 - b. Perbandingan Capain Kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya
 - c. Perbandingan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah
 - d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional / Provinsi Kabupaten
 - e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusinya
 - f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
 - g. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kegiatan
- III.2 Realisasi Anggaran
- III.3 Lampiran-Lampiran

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 didasarkan pada Visi dan Misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, serta isu strategis aktual. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025, Visi dan Misi pada RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 yaitu : VISI : "**PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH**" ini adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif-konstekstual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 Sila dari Pancasila. Semangat itu adalah dalam mewujudkan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang sangat bersifat individual pada keyakinan kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Perwujudan nyatanya ada pada semangat menjalankan tata syariat agama masing-masing berdasarkan keyakinan yang kita miliki dalam tindakan aplikatif di kehidupan sehari-hari.

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Purwakarta, adapun beberapa misi Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

Misi :	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan Kualitas SDM yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.
--------	--

Maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dengan misi kedua yaitu **“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup”**.

Pembangunan berwawasan lingkungan, adalah upaya Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk mengintegrasikan pengelolaan lingkungan hidup secara terencana, terkendali dan diawasi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam baik hulu mau hilir, secara fisik maupun sosial. Dalam rangka menuju pelestarian fungsi lingkungan agar dapat diwariskan kepada generasi masa yang akan datang.

A. Tujuan dan Sasaran

Adapun Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta untuk jangka waktu tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tujuan Pembangunan pada dasarnya adalah penjabaran dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan diwujudkan dan aktivitas pembangunan. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta harus didasarkan pada tujuan pembangunan sebagai gambaran indikasi yang lebih kongkrit dari pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Dengan mengacu kepada Visi dan Misi tersebut diatas, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024-2026, sehingga akan lebih fokus dan terarah dalam menetapkan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana dimaksud diatas :

MISI KEDUA : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik, terukur, sehingga menjadi pedoman dan sasaran kinerja bagi unsur Dinas Lingkungan Hidup, Tujuan dan Sasaran dari Dinas Lingkungan Hidup dilampirkan dalam tabel berikut ini:

**TABEL 2.1
TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PURWAKARTA**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2024		
				2024	2025	2026
1	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	67.49	69.09	70.69
			Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	75%	75%	75%
			Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100%	100%	100%
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik

II.2 RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategik juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya untuk memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 didasarkan pada Visi dan Misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, serta isu strategis aktual.

Program yang ada dibidang Dinas Lingkungan Hidup yang dilaksanakan untuk periode tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH;
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH;

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
10. Program Pengelolaan Persampahan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, dimana RKPD Kabupaten Purwakarta itu sendiri merupakan penjabaran dari Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025, terutama Pembangunan Daerah periode ke 5 Tahun 2024 -2026. Selain itu juga, dengan melihat pencapaian hasil kinerja tahun sebelumnya, isu strategis, serta merujuk pula target RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2026 dan prioritas pembangunan nasional yang sesuai dengan arah kebijakan dan Program Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 – 2026.

Tabel 2.2
RENCANA AKSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

No.	KODREK	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator	Rencana Aksi	Target			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup								
	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						
	2.11.6.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota					
	2.11.6.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Menyusun dan Mentapkan RPPLH Kabupaten/Kota				
	2.11.6.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota				

No.	KODREK	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator	Rencana Aksi	Target			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.11.06.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Melaksanakan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				
	2.11.2.06.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Melaksanakan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang				
	2.11.2.06.2.02.02	Penyelenggaraan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Melaksanakan Penyelenggaraan KLHS RPJPD/RPJMD				
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim					
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks capaian pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup					
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah,				

No.	KODREK	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator	Rencana Aksi	Target			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Air, Udara, dan Laut				
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks capaian pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup					
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup)	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup)				
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Melaksanakan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks capaian pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup					

No.	KODREK	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator	Rencana Aksi	Target			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Melaksanakan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati yang disusun					
		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Pengelolaan Perencanaan Keaneekaragaman Hayati	Melaksanakan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				
		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Menyusun dan menetapkan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati				
Terlaksananya Pengelolaan Sampah di wilayah Kab/Kota								
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan sampah yang ditangani					
		Pengelolaan Sampah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA					

No.	KODREK	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator	Rencana Aksi	Target			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Menyediakan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA				
		Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Menangani sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				
		Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota	Menyusun Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan				

No.	KODREK	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator	Rencana Aksi	Target			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			yang ditetapkan					
Ketaatan Penanggung Jawab usaha dan/atau Kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota								
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota					
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksannanya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Memfasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan	Melaksanakan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan				

No.	KODREK	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator	Rencana Aksi	Target			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	yang diawasi	Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
		Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Melaksanakan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA					
		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Tersedianya Data dan informasi keberadaan MHA					
		Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				
		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan	Tersusunnya Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal,					

No.	KODREK	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator	Rencana Aksi	Target			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan					
		Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Melaksanakan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan					
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
		Pendampingan Gerakan Peduli	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya	Melaksanakan Pendampingan Gerakan				

No.	KODREK	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator	Rencana Aksi	Target			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Peduli Lingkungan Hidup				
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Melaksanakan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup				
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup					
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH					
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Melaksanakan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat					

No.	KODREK	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator	Rencana Aksi	Target			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Melaksanakan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota				
		Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Melaksanakan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel								
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						

No.	KODREK	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator	Rencana Aksi	Target			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Menyusun Dokumen Renstra, Renja Murni dan Renja Perubahan				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan LAKIP				

No.	KODREK	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator	Rencana Aksi	Target			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Realisasi Kinerja SKPD					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Melaksanakan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Membuat SPP/SPM Gaji dan Tunjangan				
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Melaksanakan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD				
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				

No.	KODREK	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator	Rencana Aksi	Target			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Melaksanakan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD				
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Melaksanakan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Melaksanakan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat						

No.	KODREK	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator	Rencana Aksi	Target			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Daerah						
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Melaksanakan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Melaksanakan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Memfasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Menyediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				

No.	KODREK	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator	Rencana Aksi	Target			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Menyediakan Peralatan Rumah Tangga				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Menyediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Menyediakan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Memfasilitasi Kunjungan Tamu				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Melaksanakan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Menyediakan Mebel				
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Menyediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Mengadakan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau				

No.	KODREK	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator	Rencana Aksi	Target			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bangunan Lainnya				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Melaksanakan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Melaksanakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Melaksanakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan				

No.	KODREK	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator	Rencana Aksi	Target			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Melaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Melaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				

Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB.PURWAKARTA

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis	
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021		2022
				1	2	3	4	5	6	7	8		9
	SPM Permen LHNo.19tahun2008												
1	%jumlah usaha dan atau kegiatan yang	100%	-										
	Mentaati persyaratan administrasi dan			100%	100titik	120titik	120titik	150titik	89titik	100titik	120titik		
	Teknis pencegahan pencemaran air												
	%jumlah usaha dan atau kegiatan sumber	100%	-										
	Tidak bergerak yang memenuhipersyaratan			100%	20 titik	30 titik	30 titik	50 titik	20titik	20 titik	30 titik		
	Administrasi dan teknis pencegahan												

	Pencemaran udara											
	%luasan lahan dan atau tanah untuk	100%	-									
	Produksi biomasa yang telah ditetapkan			100%	2lok/titik	2lok/titik	2lok/titik	2lok/titik	-	2lok/titik	2lok/titik	
	Dan diinformasikan status kerusakannya											
	%jumlah pengaduan masyarakat akibat	90%	-									
	Adanya dugaan pencemaran dan atau			90%	65%	80%	85%	90%	105,9%	85%	90%	
	Perusakan lingkungan hidup yang di											
	Tindakanjuti											

Tabel 2.4

RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN PURWAKARTA

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2024
1	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Nilai	67.49
			Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persentase	75%
			Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase	100%
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik

Rencana kinerja program untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 .

II. 3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap Instansi Pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi yang bersangkutan. Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh setiap Pimpinan Intansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi Kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan menilai keberhasilan Organisasi. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	67,49	
			Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	75%	
			Kerataan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU KLH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100%	
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	\
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	

No	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37.436.767.027	36.906.777.218
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	425.000.000	625.000.000
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	42.750.000	433.750.000
4.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	2.495.000.000	2.730.021.182
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	0	0
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	242.500.000	216.828.000
7.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	87.500.000	50.000.000
8.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	275.000.000	275.000.000
9.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	62.500.000	51.850.000
10.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100.000.000	100.000.000
11.	Program Pengelolaan Persampahan	3.029.186.294	2.928.866.086
	JUMLAH	44.195.953.321	43.921.842.486



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

➤ Ringkasan Kinerja Sasaran

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja sebagaimana yang dikatakan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 12 adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja berisikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dan Dokumen Perencanaan, yang berisikan informasi tentang :

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,
- b. Realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama organisasi,
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dan
- d. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja dimanfaatkan untuk bahan evaluasi bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kegiatan yang diperlukan.

Tiap akhir tahun instansi pemerintah melakukan pengukuran pencapaian Target Kinerja yang ditetapkan

dalam dokumen Penetapan Kinerja, Pengukuran pencapaian target Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja. Hasil Pengukuran Kinerja dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta. Laporan ini diharapkan memberikan gambaran umum tentang tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan, baik dalam hal keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalannya.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber, yaitu:

- a. Data *Internal*, yang berasal dari sistem informasi yang ada, baik laporan kegiatan reguler seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya;
- b. Data *Eksternal*, data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Dalam pengukuran kinerja, perhitungan tingkat capaian sasaran (target), baik pada indikator Sasaran maupun indikator kinerja Kegiatan, memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

- Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus:

Prosentase	
Pencapaian Rencana =	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$
Tingkatan Capaian	

Pencapaian Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program dan kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan

realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari input, output, dan outcome. Sedangkan pencapaian indikator makro dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi indikator makro.

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DLH Kabupaten Purwakarta.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

1. 23 – 43,75 = Tidak Baik (kategori D)
2. 43,76 - 62,50 = Kurang Baik (kategori C)
3. 62,51 – 81,25 = Baik perlu sedikit perbaikan (Kategori B)
4. 81,26 - 100 = Sangat Baik (kategori A)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab – sebab tercapai atau tidak tercapainya target kinerja yang diharapkan, berdasarkan indikator – indikator yang sudah ditentukan sebelumnya, yang terdiri dari :

- *Indikator Kinerja*, adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan *indicator* masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*).
- *Indikator Kinerja Sasaran/Pengukuran Pencapaian Sasaran*, adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.
- *Indikator Kinerja Kegiatan / Pengukuran Kinerja Kegiatan*.

Kinerja kegiatan dikelompokkan kedalam :

- a. Masukan (*input*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.

- b. Keluaran (*output*), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang berupa fisik maupun non-fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
- c. Hasil (*outcome*), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keseluruhan kegiatan pada jangka waktu menengah, *outcome* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta untuk tahun 2024 telah menentukan 3 (tiga) sasaran, dan 5 (lima) indikator. Sasaran Strategis Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026:

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI TAHUN INI

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah didukung dengan pengembangan pengukuran capaian sakin yang diukur dengan 1 (satu) Tujuan / sasaran dan 2 (dua) indikator, pertama persentase capaian sakin merupakan gambaran capaian sakin yang mempunyai keterampilan . Untuk mendukung pelaporan, penyusunan keterampilan dan kemampuan capaian sakin ini didukung oleh 1 program. Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di dukung dengan pengembangan pengukuran yang diukur dengan 2 (dua) Tujuan / sasaran dan 3 (tiga) indikator, pertama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota dengan realisasi 61,15. Kedua, Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota dengan realisasi 73,6%. Ketiga, Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan realisasi 136,36%. Pada tahun 2024 tujuan dan sasaran ini ditampilkan dalam Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2024	Realisasi Kinerja Sasaran Pada Tahun 2024	Capaian	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Poin	67.49	61.15	90.60	DLH
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	75 %	73.6%	98.13%	DLH
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	100 %	136.36%	136.36%	DLH
2	Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	100	Hasil Penilaian Inspektorat
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	BB	Baik	Baik	Yanlink Smart

Capaian kinerja organisasi yang diperoleh Dinas lingkungan Hidup mendapatkan predikat sangat istimewa dengan Predikat A dengan nilai 80,4. Untuk indeks kepuasan masyarakat mendapat predikat baik yang diperoleh data dari Yanlink Smart.

B. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN BEBERAPA TAHUN SEBELUMNYA

Pada Tahun 2023 untuk Capaian Kinerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif dan akuntabel mendapatkan nilai capaian SAKIP dengan Predikat A dengan nilai 80,4. Pada tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta juga mencapai sasaran hasil yang sangat baik. Untuk itu disajikan dalam tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	-	-	-	67.49	61.15	90.60
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	-	-	-	75%	73.6%	98.13%
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	100%	136.36%	136.36%
2	Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	A	100	BB	A	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	100%	Baik	Baik	100%

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai

keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, Pada Tahun 2023 sasaran meningkatkan kualitas pelayanan bidang lingkungan hidup mencapai realisasi 100% pada indikator kinerja terjaga dan terlindungi nya Sumber Daya Alam (Mata Air) dan mencapai realisasi 99.90% pada indikator terlaksananya kegiatan mitigasi dan mitigasi perubahan iklim. Untuk indikator kinerja meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana lingkungan, terpeliharanya kebersihan lingkungan dan perkotaan mencapai realisasi 93.08 %. Indikator tercapainya sosialisasi penegakan hukum lingkungan ke perusahaan yang ada di Kabupaten Purwakarta mencapai realisasi 100%. Untuk capaian sasaran Tahun 2024 dijelaskan pada tabel diatas.

Tabel 3.3

Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir RPD 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	4/5*100
1	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	90.60	100	90.6
		Terlaksananya pengelolaan sampah diwilayah Kab/Kota	98.13%	100%	98.13%
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	136.36%	100%	136,36%
2	Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	BB	100

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir RPD 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	4/5*100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	100

C. PERBANDINGAN REALISAI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN STANDAR NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH Nasional merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional. IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Provinsi di Indonesia, dimana IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut.

Mulai tahun 2020, indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO₃, dan Fecal Coli; (2) Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂; (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi lindung; dan (4) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat. Pada tahun 2021, perhitungan IKLH mulai diterapkan hingga level kabupaten/kota. Indikator untuk menghitung IKLH kabupaten/kota sedikit berbeda dengan indikator untuk menghitung nilai IKLH provinsi dan nasional.

Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta tahun 2024 bernilai 61.15 dengan kategori sedang, saat ini peringkat nasional IKLH Kabupaten Purwakarta berada di peringkat ke 406 dari

514 Kabupaten/Kota, dan peringkat provinsi Kabupaten Purwakarta berada di peringkat 15 dari 27 Kabupaten/Kota.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional Kementerian Lingkungan Hidup

No	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Purwakarta		Standar Kementerian Lingkungan Hidup		Capaian %
1	2	3		4		3/4*100
1.	IKLH	61,15	Sedang	73,07	Sedang	83.68 %
2.	IKA	54,67	Sedang	92.03	baik	59%
3.	IKU	77,64	Baik	89,70.	baik	86,55%
4.	IKL	42,15	Kurang	78,84	baik	53.46%

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSINYA

Faktor yang mendukung keberhasilan capaian Tujuan, sasaran dan indikator dari 2 Tujuan / Sasaran dan 5 Indikator adalah optimalnya Pencapaian Target dan realisasi. Sedangkan Tujuan / Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota mencapai 67.49 dengan realisasi 61.15 dengan capaian nilai 90.60, indikator terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab / Kota dengan target 75% dengan capaian realisasi 73.6 % dan capaian 98.13%. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan target

100% dengan capaian realisasi 133.63 % dan capaian 133.63 %. Tujuan / Sasaran Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel dengan indikator Capaian SAKIP DLH dengan predikat nilai A (sangat memuaskan). Dan Indeks kepuasan masyarakat dengan Capaian Baik. Penjelasan tersebut menerangkan dalam rangkuman sesuai tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusinya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	67.49	61.15	90.60	Keberhasilan : Mendapatkan Piagam penghargaan Proklamasi Tingkat Nasional untuk 4 dusun di Kabupaten Purwakarta. Kegagalan : Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM)	Menambah Anggaran Kegiatan dan Sumber Daya Manusia (SDM)
						Keberhasilan: Terlaksananya sosialisasi regulasi PPA PPU dan PLB3 di Kab Purwakarta	Meningkatkan sosialisasi regulasi PPA PPU dan PLB3
						Keberhasilan: Terlaksananya pembinaan pada perusahaan-perusahaan, terlaksananya	Menambah Sumber Daya Manusia (SDM)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						kegiatan pemantauan uji kualitas air permukaan sungai DAS Citarum dan Cilamaya serta terlaksananya kegiatan susur sungai di drainase menuju cilamaya. Kegagalan : Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)	
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	75%	73.6%	98.13%	Keberhasilan: Tersedianya Ekstra Fooding Bagi Petugas Lapangan Kegagalan: Kurangnya SDM Aparatur Sipil Negara	Penambahan SDM untuk Koordinatar dan Pengadministrasi umum
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU	100%	136.36%	136.36%	Keberhasilan: Terlaksananya Properda, Terlaksananya kegiatan susur sungai dalam rangka	Menambah Jumlah SDM

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
		LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota				memperingati hari jadi lingkungan hidup Kegagalan: Kurangnya SDM Aparatur Sipil Negara	
2	Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	A	100	Adanya perubahan belanja untuk Belanja Makan dan Minum Rapat untuk proses pencairan setelah tanggal 8 Oktober 2024 mengacu pada standar harga perpres 33 tahun 2020 sehingga belanja tidak sesuai penganggaran RKA Keberhasilan: Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART,	Penganggaran pada RKA mengacu pada aturan terbaru Kedepannya, dalam penyusunan laporan akan melampirkan kertas kerja dari masing-masing bidang yang mencakup semua elemen penting,

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						<p>menggunakan penyesuaian (cascading) di setiap level secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting). Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkelanjutan.</p> <p>Kegagalan: Perlu adanya penyempurnaan dokumen-dokumen. Tercapainya dokumen perencanaan SAKIP</p>	seperti periode pelaporan dan ringkasan pencapaian kinerja.
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	100%	<p>Keberhasilan: Meningkatnya tertib administrasi pemerintah</p> <p>Kegagalan : DLH belum memiliki website resmi</p>	Membuat website resmi DLH dan memberikan informasi mengenai DLH agar masyarakat lebih mengetahui tentang program apa saja di dinas lingkungan hidup

Faktor penyebab terjadinya keberhasilan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Mendapatkan Piagam penghargaan Proklim Tingkat Nasional untuk 4 dusun di Kabupaten Purwakarta;
2. Terlaksananya sosialisasi regulasi PPA PPU dan PLB3 di Kab Purwakarta;
3. Tersedianya Ekstra Fooding Bagi Petugas Lapangan;
4. Terlaksananya penilaian kinerja masyarakat / lembaga masyarakat / dunia usaha / dunia pendidikan / filantropi dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang diberikan kepada 20 perusahaan se-Kabupaten Purwakarta;
5. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik;
6. Meningkatnya tertib administrasi pemerintah.

Faktor penyebab kegagalan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Keterbatasan Anggaran, kegiatan - kegiatan terkendala pada keterbatasan anggaran yang ditetapkan sehingga ada kegiatan yang terhambat;
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian di bidang lingkungan sehingga mengakibatkan terkendalanya dalam proses pengerjaan kegiatan;
3. Dinas Lingkungan Hidup belum memiliki website resmi sehingga mengakibatkan kurang maksimal dalam pemberian informasi pada masyarakat.

F. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten / Kota dicapai dengan adanya dukungan beberapa faktor SDM yang sangat berperan aktif baik dari ketersediaan SDM dan Anggaran. Dalam Pelaksanaan Program kegiatan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta didukung SDM yang kompeten dibidangnya seperti Tenaga Ahli Lingkungan serta disamping itu adanya dukungan anggaran APBN maupun APBD juga sangat menentukan pencapaian target kualitas lingkungan hidup pada Tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dilampirkan pada tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/sasaran	Target	Indikator Kinerja			Anggaran			
			Indikator kegiatan	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Tingkat Efisiensi
						(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 dokumen	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 dokumen	100%	31.022.000	6.599.000	94.58%	0.98
2		1 dokumen	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	6 dokumen	100%	268.978.000	255.356.000	82.13%	0.98
3		1 dokumen	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	100%	31.022.000	6.599.000	21.27 %	0.98
4		1 dokumen	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	5 dokumen	100%	225.000.000	203.670.000	90.52%	0.99
5		4 dokumen	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dokumen	100%	410.767.000	377.072.650	91.80%	0.99
6		1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	100%	1.189.330.000	1.175.288.815	98.82%	0.99
7		1 dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 dokumen	100%	37.500.000	34.090.000	90.91%	0.99

No	Tujuan/sasaran	Target	Indikator Kinerja			Anggaran			
			Indikator kegiatan	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Tingkat Efisiensi
						(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8		1 dokumen	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	1 dokumen	100%	92.500.000	87.392.600	94.48%	0.99
9		4 orang	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	4 orang	100%	30.000.000	29.775.000	99.25%	0.99
10		2 kelompok	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2 kelompok	100%	743.504.258	730.654.039	98.27%	0.98
11		5 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5 unit	100%	380.000.000	377.411.000	99.32%	0.99
12		42890 ton	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	459.0906671 ton	100%	1.999.561.828	1.525.523.704	76.29%	0.98
13		100%	Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	-	-	35.800.000	0	-	-
14		1 dokumen	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	30 dokumen	100%	94.328.000	91.456.000	96.96%	0.99

No	Tujuan/sasaran	Target	Indikator Kinerja			Anggaran			
			Indikator kegiatan	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Tingkat Efisiensi
						(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15		4 orang	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	1 orang	100%	30.000.000	29.775.000	99.25%	0.99
16		2 dokumen	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dokumen	100%	410.767.000	377.072.650	91.80%	0.98%
17		1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	-	-	-	-	0	0
18		1 dokumen	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 dokumen	100%	50.000.000	6.866.000	13.73%	0.98%
19		1 dokumen	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	100%	200.000.000	178.129.500	89.06%	98.9%
20		60 orang	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	60 orang	100%	75.000.000	71.866.000	95.85%	0.99%
21		20 Entitas	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	40 entitas	100%	51.850.000	50.814.500	98.00%	0.98%

No	Tujuan/sasaran	Target	Indikator Kinerja			Anggaran			
			Indikator kegiatan	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Tingkat Efisiensi
						(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
22		1 dokumen	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1 dokumen	100%	50.000.000	42.056.267	84.11%	0.98
23		1 dokumen	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dokumen	100%	61.312.000	51.441.401	83.90%	0.98
44		5 dokumen	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	5 dokumen	100%	1.041.608.182	970.900.550	93.21%	0.98
25	Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	100	Capaian Sakip Perangkat Daerah	80.04	100%	37.076.777.218	35.257.851.248	95.09%	0.98

➤ Analisa Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan tabel 3.6 yang disajikan, sebagian besar kegiatan telah berhasil memenuhi tujuan kinerjanya dengan tingkat efisiensi anggaran yang terpuji, termasuk Jumlah Badan Usaha yang Diawasi (No. 8), Peningkatan Kapasitas PPLHD (No. 9), dan Jumlah Fasilitas dan Infrastruktur Pengelolaan Sampah (No. 11), yang semuanya mencapai 100% dari target mereka dengan efisiensi anggaran melebihi 98%. Namun demikian, terdapat perbedaan tertentu antara perencanaan dan hasil aktual, terutama Jumlah Sampah yang Ditangani (No. 12), yang hanya mencapai 76,29% dari realisasi anggaran meskipun memenuhi target kinerja, mirip dengan MHA Pemberdayaan dan Pendampingan terkait PPLH (No. 18), yang realisasi hanya 13,73%. Selanjutnya, Jumlah Dokumen Kerjasama Pengelolaan Sampah (No. 13) tidak menunjukkan realisasi anggaran, sama dengan Penyusunan Dokumen LHS Kabupaten/ RPIMD Kabupaten/Kota (No. 3), yang hanya mencapai 21,27% dari target, sehingga menunjukkan adanya hambatan administrasi atau faktor lain yang berkontribusi terhadap keterlambatan pelaksanaan. Meskipun pencapaian kinerja secara keseluruhan terpuji dengan efisiensi anggaran yang substansial, kegiatan tertentu memerlukan penilaian lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan realisasinya.

G. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Capaian Program	Menunjang / Tidak Menunjang
1	Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	Menunjang
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Menunjang
2	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten / Kota	90.60%	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota ➢ Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota ➢ Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten 	89.63%	Menunjannng
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim; ➢ Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air; 	94.90%	Menunjang

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Capaian Program	Menunjang / Tidak Menunjang
					<ul style="list-style-type: none"> ➢ Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara; ➢ Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan. 		
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	➢ jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun	90.91%	Menunjang
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di wilayah Kabupaten / Kota	98.13%	Program Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Timbulan sampah yang ditangani ➢ Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R ➢ Persentase cakupan area pelayanan ➢ Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota ➢ Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan 	83.37%	Menunjang
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh	136.36%	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota ➢ Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang 	96.22%	Menunjang

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Capaian Program	Menunjang / Tidak Menunjang
		Pemerintah Daerah Kab/Kota			<p>diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota ➤ Persentase pembinaan/sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan ke Perusahaan 		
				Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA ➤ Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional ➤ Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional ➤ Penetapan hak MHA ➤ Terasilitasi penyediaan sarana/prasarana 	13.73%	Tidak Menunjang
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	➤ Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	86.37%	Menunjang

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Capaian Program	Menunjang / Tidak Menunjang
				Program Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan ➤ Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat 	90.91%	Menunjang
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup ➤ Persentase peraih PROPER kategori Taat/Biru 	98.00%	Menunjang

Tabel diatas menunjukkan bahwa sasaran strategis Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan pada 3 indikator Dinas Lingkungan Hidup, program kegiatan tahun 2024 berhasil dilaksanakan dan menunjang keberhasilan. Namun pada indikator Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota capaian kegiatan mendapat capaian paling sedikit dengan realisasi 13,73% sehingga tidak menunjang keberhasilan, permasalahan utama nya terletak pada ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai, sehingga menghambat kinerja kegiatan tersebut. Untuk itu di harapkan agar ditambahkannya Sumber Daya Manusia (SDM) agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil analisis faktor keberhasilan pencapaian kinerja, faktor kegagalan pencapaian kinerja, rencana/solusi tindak lanjut yang akan datang antara lain:

1. Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja :

- ✓ Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah;
- ✓ Tercapainya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
- ✓ Tercapaiannya Kegiatan Program Kampung Iklim (PROKLIM);

2. Faktor Kegagalan Pencapaian Kinerja :

- ✓ Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga menghambat keberhasilan kegiatan;
- ✓ Paket Pengadaan ditunda dikarenakan bersamaan dengan Program dari KLHK;
- ✓ Keterbatasan anggaran pada uang persediaan bidang sehingga Perjalanan Dinas ada beberapa yang tidak terbayar dan adanya perubahan belanja untuk Belanja Makan dan Minum Rapat untuk proses pencairan setelah tanggal 8 Oktober 2024 mengacu pada standar harga perpres 33 tahun 2020 sehingga belanja tidak sesuai penganggaran RKA.

III.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Tahun anggaran 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta melaksanakan program kegiatan sub.kegiatan dengan pagu anggaran sejumlah Rp.44.338.558.486 ,- yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota sejumlah Rp.36.499.920.433,-. Program Perencanaan Lingkungan Hidup sejumlah Rp. 625,000,000,- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sejumlah Rp.2.746.767.182,- Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sejumlah Rp.242.500.000, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat sejumlah Rp. 275.000.000, Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat sejumlah Rp.651.850.000,Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup sejumlah Rp. 100.000.000 , Program Pengelolaan Persampahan Rp. 3.158.866.086. Realisasi total anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah Rp.41.695.208.520 Atau 94.04 % dari total anggaran Rp. 44.338.558.486,- Realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta tertuang tabel 3.8 Berikut ini, dan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 3.8 berikut ini :

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran tahun 2024

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	36.499.920.433	31.947.552.639	87,53 %
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000	37.001.900	93,70 %
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	13,425,000	89.50%
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10,000,000	9,944,000	99.44%
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10,000,000	9,809,000	98.09%

2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10,000,000	8,412,000	84.12%
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	20,000,000	19,987,000	99.94%
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	7,707,000	77.07%
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.597.055.950	11,770,927,106	93.44%
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.562.167.950	11,736,520,606	93.43%
2.11.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	13.040.000	12,857,000	98.60%
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keunagna Akhir Tahun SKPD	11.848.000	11,776,000	99.39%
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000	9,773,500	97.74%
2.11.01.2.03.01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	100
2.11.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,000,000	10,000,000	100.00 %
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	794,802,000	763,183,000	98.06%
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	690.810.000	690,247,000	53,03%
2.11.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8,880,000	8,880,000	100.00%
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50,000,000	35,487,000	70.97%
2.11.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	19,951,000	99.76%

2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.503.617.862	6.187.689.636	95,14%
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	20,644,000	99.76%
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50,000,000	37,713,000	75.43%
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.244.638.252	6,199,855,526	99.28%
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	94.854.500	89,294,000	94.14%
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	12,045,000	40.15 %
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70,000,000	66,525,000	95.04%
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.272.496.016	11.842.596.061	90,37 %
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	100%
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	275,000,000	178,206,038	64.80 %
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.993.496.016	11.660.390.023	97.22%
2.11.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.256.936.500	3,908,441,805	91.81%
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100,000,000	83,715,500	83.72%
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.975.516.500	2,667,229,200	89.64%

2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	225,000,000	207,000,000	92.00%
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sapras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	448.336.000	448,128,605	99.95%
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	625,000,000	560,208,000	89.63%
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota	368.978.000	349,939,000	94.84%
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota	100.000.000	94,583,000	94.58%
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten / Kota	268.978.000	255.356.000	94.94%
2.11.02.2	Penyelenggaraan KLHS Kabupaten / Kota	256.022.000	210.269.000	
2.11.02.2.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	31.022.000	6.599.000	21.27%
2.11.02.2..02	Penyelenggaraan KLHS RPJPD/RPJMD	225.000.000	203.670.000	90.52%
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.746.767.182	2,606,776,662	94.90%
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.600.097.000	1,552,361,465	97.02%
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut (UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup)	410.767.000	377.072.650	91.80%
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan	1.189.330.000	1,175,288,815	98.82%

	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut			
2.11.04.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/Kota	43,750,000	32,073,246	73.31%
2.11.04.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	43,750,000	32,073,246	73.31%
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	242,500,000	208,623,600	96.22%
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemda Kab/Kota	216.828.000	208,623,600	96.22%
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau	94.328.000	91,456,000	96.96%
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	92,500,000	87,392,600	94.48%
2.11.06.2.01.07	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	30,000,000	29775000	99.25%
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan	275,000,000	250,015,500	90.91%

	Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah	275,000,000	250,015,500	90.91%
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	200,000,000	178,129,500	89.06%
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	75,000,000	71,886,000	95.85%
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	651.850.000	50,814,500	98.00%
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah	51.850,000	50,814,500	98.00%
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaam LH	51,850.000	50,814,500	98.00%
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100,000,000	86,374,267	86.37%
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100,000,000	86,374,267	86.37%
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten / Kota	50,000,000	42,056,267	84.11%
2.11.10.2.01.06	Penerapan sanksi administrasi yang			

	menjadi kewenangan kabupaten/kota	50,000,000	44,318,000	88.64%
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	3.158.866.086	2,633,588,743	83.37%
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	3.158.866.086	2,633,588,743	83.37%
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	743.504.258	730.654.039	98.27%
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	380,000,000	377,411,000	99.32%
2.11.11.2.01.17	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.999.561.828	1.525.523.704	76.29%
2.11.11.2.01.21	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	35.800.000	0	-
JUMLAH BELANJA OPERASIONAL		44.338.558.486	41.695.208.520	94.04%

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan TA. 2024

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				36.499.920.433	31.947.552.639	87,53 %
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja				75,000,000	69,284,000	92.38

	Perangkat Daerah						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen Renja Murni dan 1 Dokumen Renja Perubahan	1 Dokumen Renja Murni dan 1 Dokumen Renja Perubahan	100 %	15,000,000	13,425,000	89.50
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen RKA-SKPD	100 %	10,000,000	9,944,000	99.44
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 %	10,000,000	9,809,000	98.09
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen DPA-SKPD	100 %	10,000,000	8,412,000	84.12
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 %	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1 Laporan LAKIP	1 Laporan LAKIP	100 %	20,000,000	19,987,000	99.94
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan LPPD	1 Laporan LPPD	100 %	10,000,000	7,707,000	77.07 -
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12,597,055,950	11,770,927,106	93.44
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan, 130 Orang	10 Bulan	71,42%	12,562,167,950	11,736,520,606	93.43
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	3 Dokumen Laporan Triwulan	75%	13,040,000	12,857,000	98.60
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100 %	11,848,000	11,776,000	99.39
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100 %	10,000,000	9,773,500	97.74
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-	-	-
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	4 laporan	100%	10,000,000	10,000,000	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				778,308,000	763,183,000	98.06
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket Jas Hujan , 1 Oaket Boots, 2 Paket Pakaian	1 Paket Jas Hujan , 1 Oaket Boots, 2 Paket Pakaian	100 %	690,810,000	690,247,000	99.92

		Petugas Kebersihan	Petugas Kebersihan				
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	8,880,000	8,880,000	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	128 Orang	13 Orang	10,15 %	50.000.000	35,487,000	70.97
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	513 Orang	513 Orang		20,000,000	19,951,000	99.76
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				6.503.617.862	6.187.689.636	95,14
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	Recofusing Anggaran	-	30.000.000	20.644.000	99.76%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23 Jenis	22 Jenis	95,65 %	50.000.000	37.713.000	75.43 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	Pertalite 11.320,5 Liter, Solar 40.535 Liter dan Dexlite 8.190 Liter	95,69 %	6.244.638.252	6.199.855.526	95,69 %
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6 Paket	6 Paket	100 %	72.500.000	61.040.000	84,19 %
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6 Laporan	50 %	25.000.000	5.300.000	21,20 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10 Laporan	83,33 %	74.600.000	69.077.986	99,28 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah				251.443.500	248.755.000	98,93 %
	Pengadaan Mebel						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit Printer, 2 Unit Face Detector, 3 Unit Exhaust Fan, 3 Unit Laptop, 5 Unit PC All in	1 Unit Printer, 2 Unit Face Detector, 3 Unit Exhaust Fan, 3 Unit Laptop, 5 Unit PC All in	100 %	306.474.000	207.045.000	67,56%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12.272.496.016	11.842.596.061	96,50 %
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4 Laporan	33,33 %	4.000.000	4.000.000	100,00 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	10 Laporan	83,33 %	249.973.584	158.744.149	63,50 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	10 Laporan	83,33 %	11.993.496.016	11.660.390.023	99,71 %

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.256.936.500	3.908.441.805	91.81%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 Unit	10 Unit	100 %	100.000.000	94.076.400	94,08 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit Rekondisi Mobil Toilet, 40 Unit Pengurusan Izin dan/atau Pajak, 64 Unit Pemeliharaan Kendaraan Operasional Lapangan	1 Unit Rekondisi Mobil Toilet, 40 Unit Pengurusan Izin dan/atau Pajak, 64 Unit Pemeliharaan Kendaraan Operasional Lapangan	100 %	2.975.516.500	2.667.229.200	89.64 %
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	1 Unit	1 Unit	100 %	225.000.000	207.000.000	92.00 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saprasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	100 %	448.336.000	448.128.605	99.95%
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup				390.915.000	138.817.500	35,51 %
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota				390.915.000	138.817.500	35,51 %
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100.000.000	94.583.000	94.58 %
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten / Kota	1Dokumen	-	Tidak ada realisasi fisik, karena sampai dengan triwulan IV hanya dikeluarkan SPPD saja	268.978.000	255.356.000	94.94%
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				256.022.000	210.269.000	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	5 dokumen	5 dokumen		31.022.000	6.599.000	

	Penyelenggaraan KLHS RPJPD/RPJMD	5 dokumen	5 dokumen		225.000.000	203.670.000	
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut (UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup)	1 Dokumen	1 dokumen	61,11 %	61.312.0000	51.441.401	83.90%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut	82 Dokumen	82 Dokumen	100 %	410.767.000	377.072.650	91.80%
	Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1.189.330.000	1.022.341.951	92.69%
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	1.041.608.182	970.900.550	93.21%
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/Kota				43.750.000	32.073.246	73.31 %
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	1 :aporan	1 Laporan	100 %	43.750.000	32.073.246	73.31 %
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				126.376.000	122.338.800	96,81 %

	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemda Kab/Kota				126.376.000	122.338.800	96,81 %
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau	30 Dokumen	30 dokumen	100%	94.328.000	91.456.000	96.96%
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50 laporan	50 laporan	100 %	92.500.000	87.392.600	94.48%
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	1 orang	1 orang	100 %	30.000.000	29.775.000	99.25 %
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				275.000.000	250.015.500	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah				275.000.000	250.015.500	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	26 dokumen	26 dokumen	100 %	200.000.000	178.129.500	89.06%
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	60 Orang	60 Orang	100 %	75000.000	71.886.000	95,85%
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				51.850.000	50.814.500	98.00%
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah				51.850.000	50.814.500	98.00%
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	20 Entitas	20 Entitas	100 %	51.850.000	50.814.500	98.00%
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				100.000.000	86.374.267	86.37%

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota					100.000.000	86.374.267	86.37%
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten / Kota	1 dokumen	1 dokumen	50%		50.000.000	42.056.267	84.11%
Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 dokumen	1 dokumen			50.000.000	44.318.000	88.64%
Program Pengelolaan Persampahan					3.158.866.086	2.633.588.743	83.37%
Pengelolaan Sampah					3.158.866.086	2.633.588.743	83.37%
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	2.880 kelompok	2.880 kelompok	100%		743.504.258	730.654.039	98.27%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1 unit	1 unit			380.000.000	377.411.000	99.32%
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	459.0906671 ton	459.0906671 ton			1.999.561.828	1.525.523.704	76.29 %
Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	1 dokumen	-			35.800.000	0	0%

Yang Mendukung Pencapaian Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

Tahun 2024

Selain pencapaian sasaran strategis tersebut, kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dapat dilihat pada keberhasilan pembinaan terhadap perusahaan – perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta yang meraih penghargaan pada pelaksanaan kegiatan PROPERDA Tahun 2016 oleh BPLHD Provinsi Jawa Barat. Dimana PROPER adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tujuannya adalah :

- ✓ Meningkatkan penataan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan;
- ✓ Meningkatkan komitmen para stakeholder dalam upaya pelestarian lingkungan ;
- ✓ Meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan;
- ✓ Meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk menaati peraturan perundangan-undangan dibidang lingkungan hidup;
- ✓ Mendorong penerapan prinsip Reduce, Reuse, Recycle, dan Recovery (4R) dalam pengelolaan limbah.

Prinsip dasar Proper adalah mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui instrument insentif reputasi / citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang baik dan instrument diinsentif reputasi /citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang buruk.

Sistem peringkat kinerja PROPER mencakupi pemeringkatan perusahaan dalam 5 (Lima) peringkat warna yang mencerminkan kinerja pengelolaan lingkungan secara keseluruhan , yaitu emas,hijau, biru, merah dan hitam. Perusahaan berperingkat merah dan hitam merupakan perusahaan yang belum taat, perusahaan berperingkat biru adalah perusahaan yang taat, sedangkan perusahaan hijau dan emas adalah perusahaan yang pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**DAFTAR PERINGKAT PROPERDA KAB. PURWAKARTA
PERIODE PENILAIAN TAHUN 2023 S/D 2024**

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS PROPER YANG DI IKUTI	PERINGKAT PROPER
1	PERUM JASA TIRTA II UNIT PLTA	NASIONAL	
2	PT. ABIMANYU SEKAR NUSANTARA	NASIONAL	
3	PT. ASSA PAPER	NASIONAL	
4	PT. BESLAND PERTIWI	NASIONAL	
5	PT CHEMSTAR INDONESIA	NASIONAL	
6	PT. CONBLOC INTERNUSA PLANT PURWAKARTA	NASIONAL	
7	PT. DONG LIM CHEMICAL	NASIONAL	
8	PT. EINS TREND	NASIONAL	
9	PT. FLAMINDO CARPETAMA	NASIONAL	
10	PT. GISTEX	NASIONAL	
11	PT. GISTEX CHEWON SYNTHETIC	NASIONAL	
12	PT. HINO MOTOR MANUFACTURING INDONESIA	NASIONAL	
13	PT. INDO BHARAT RAYON	NASIONAL	
14	PT. INDOFOODCBP SUKSES MAKMUR Tbk - FID DIVISION PURWAKARTA	NASIONAL	
15	PT. INDONESIA VICTORY GARMENT	NASIONAL	
16	PT. INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk	NASIONAL	
17	PT. NDORAMA POLYCHEM INDONESIA	NASIONAL	
18	PT. INDORAMA SYNTHETICS Tbk - PURWAKARTA	NASIONAL	
19	PT. INDOTAMA FERRO ALLOYS	NASIONAL	
20	PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk - HATCHERY GP WANAYASA	NASIONAL	
21	PT. JAYA BETON INDONESIA - PLANT SADANG	NASIONAL	

22	PT. KOTOBUKIYA INDO CLASSIC INDUSTRIES	NASIONAL	
23	PT. LION METALWORKS Tbk	NASIONAL	
24	PT. METRO PEARL INDONESIA	NASIONAL	
25	PT. MITSUBA AUTOMOTIVE PARTS INDONESIA	NASIONAL	
26	PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk - PURWAKARTA	NASIONAL	
27	PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS	NASIONAL	
28	PT. NORITAKE INDONESIA	NASIONAL	
29	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII (PERSERO) - KEBUN CIKUMPAY	NASIONAL	
30	PT. PERSADA PUPUK INDONESIA	NASIONAL	
31	PT. PJB PLTA CIRATA	NASIONAL	
32	PT. PRIMA ILJO	NASIONAL	
33	PT. PURINUSA EKAPERSADA - PURWAKARTA	NASIONAL	
34	PT. PURWAKARTA JAYA SEJAHTERA PAMOYANAN	NASIONAL	
35	PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE	NASIONAL	
36	PT. SURI TANI PEMUKA - PURWAKARTA	NASIONAL	
37	PT. SYN TOBA GRAFIKA	NASIONAL	
38	PT. VELASTO INDONESIA	NASIONAL	
39	PT. WARRENTY INDUSTRIES	NASIONAL	
40	PT. WIN TEXTILE	NASIONAL	
41	PT. ZEUS KIMIATAMA INDONESIA - PURWAKARTA	NASIONAL	
42	RUMAH SAKIT BHAKTI HUSADA II PURWAKARTA	NASIONAL	
1	RSU. SILOAM INTERNASIONAL	PROVINSI JAWA BARAT	BIRU
2	PT. PUTRA NAGA INDOTAMA	PROVINSI JAWA BARAT	BIRU
3	RSU. DR. ABDUL RADJAK	PROVINSI JAWA BARAT	BIRU
4	PT. EAST WEST SEED INDONESIA	PROVINSI JAWA BARAT	MERAH
5	PT. INDO-RAMA SYNTHETICS TBK, INDORAMA TEKNOLOGIS COMPLEX	PROVINSI JAWA BARAT	BIRU
6	RS. RAMA HADI	PROVINSI JAWA BARAT	BIRU

7	RSUD BAYU ASIH	PROVINSI JAWA BARAT	BIRU
8	RSU. AMIRA	PROVINSI JAWA BARAT	BIRU
9	RSU. ASRI	PROVINSI JAWA BARAT	BIRU
10	RS. HOLISTIC INDONESIA	PROVINSI JAWA BARAT	BIRU
11	PT. BUKIT INDAH MANDIRI ABADI (PRIME PLAZA HOTEL PURWAKARTA)	PROVINSI JAWA BARAT	BIRU
12	PT. BOUNTY SEGAR INDONESIA	PROVINSI JAWA BARAT	BIRU
13	PT. CLAMA INDONESIA	PROVINSI JAWA BARAT	BIRU
14	PT. JAPFA COMFEED INDONESIA TBK, UNIT FARM BOJONG 1	PROVINSI JAWA BARAT	BIRU
15	PT. JAPFA COMFEED INDONESIA TBK, UNIT FARM BOJONG 2	PROVINSI JAWA BARAT	BIRU
16	PT. JAPFA COMFEED INDONESIA TBK, UNIT FARM KIARAPEDES 1	PROVINSI JAWA BARAT	BIRU
17	PT. JAPFA COMFEED INDONESIA TBK, UNIT PURWAKARTA	PROVINSI JAWA BARAT	BIRU
18	PT. HAMPARAN ANUGRAH NUSANTARA	PROVINSI JAWA BARAT	BIRU
19	PT. ASTRA INTERNATIONAL (AUTO 2000)	PROVINSI JAWA BARAT	MERAH
20	PT. URASE PRIMA	PROVINSI JAWA BARAT	MERAH
21	PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM	PROVINSI JAWA BARAT	TIDAK DIKELUARKAN PERINGKAT
22	PT. SINAR SUKSES MANDIRI	PROVINSI JAWA BARAT	TIDAK DIKELUARKAN PERINGKAT
1	PT. INDACHI PRIMA	KABUPATEN PURWAKARTA	BIRU
2	PT. SKY FOAM	KABUPATEN PURWAKARTA	BIRU
3	PT. FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY MANUFACTURING	KABUPATEN PURWAKARTA	BIRU
4	PT. PRESHION ENGPLAS	KABUPATEN PURWAKARTA	BIRU
5	PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR, TBK PACKAGING DIVISION PURWAKARTA	KABUPATEN PURWAKARTA	BIRU
6	PT. FD INDUSTRI INDONESIA	KABUPATEN PURWAKARTA	BIRU

7	PT. SUMI INDO WIRING SYSTEMS	KABUPATEN PURWAKARTA	BIRU
8	PT. SANWA MUSEN	KABUPATEN PURWAKARTA	BIRU
9	PT. JTEKT COLUMN SYSTEM INDONESIA	KABUPATEN PURWAKARTA	BIRU
10	PT. BERKAH DOA MULTAZAM (RSU KARINA MEDIKA)	KABUPATEN PURWAKARTA	BIRU
11	PT. UNIVANCE INDONESIA	KABUPATEN PURWAKARTA	BIRU
12	PT. ELEGANT TEXTILE INDUSTRY	KABUPATEN PURWAKARTA	BIRU
13	PT. NAXIS LABEL	KABUPATEN PURWAKARTA	BIRU
14	PT. SAMCON	KABUPATEN PURWAKARTA	BIRU
15	PT. STANDARD BIOSENSOR HEALTHCARE	KABUPATEN PURWAKARTA	BIRU
16	PT. YC TEC	KABUPATEN PURWAKARTA	BIRU
17	PT. ERINAKA PERDANA	KABUPATEN PURWAKARTA	BIRU
18	PT. UNIPRESS INDONESIA	KABUPATEN PURWAKARTA	MERAH
19	PT. PENJALINDO NUSANTARA (METAFORM)	KABUPATEN PURWAKARTA	MERAH
20	PT. SINAR SUKSES MANDIRI	KABUPATEN PURWAKARTA	TIDAK DIKELUARKAN PERINGKAT



BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN UMUM

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, sasaran strategis dan indikator keberhasilan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dari indikator kinerja yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2024 indikator berhasil tercapai yakni indikator Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel, dan yang belum tercapai sepenuhnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup oleh karena perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk data capaian kinerja ada pada tabel dibawah ini:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2024	Realisasi Kinerja Sasaran Pada Tahun 2024	Capaian	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	67.49	61.15	90.60	DLH
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	75 %	73.6 %	98.13%	DLH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2024	Realisasi Kinerja Sasaran Pada Tahun 2024	Capaian	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	136.36%	136.36%	DLH
2	Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	A	100	Hasil Penilaian dari Inspektorat
		Indeks Kepuasan Masyarakat	BB	Baik	Baik	Yanlink Smart

Capaian Anggaran program dan Kegiatan Tahun 2024 sebesar Rp.44.338.588.486,- dengan capaian persentase 94,04% %.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk lebih mengoptimalkan peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, berdasarkan dari hasil analisis capaian kinerja diatas, maka kedepannya harus dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

- ✓ Perlunya optimalisasi anggaran yang terkait dengan Capaian Indeks Kinerja Lingkungan Hidup (IKLH).
- ✓ Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dibidang Administrasi dan Keuangan.

- ✓ Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia di bidang pengelolaan lingkungan hidup, baik itu berupa diklat teknis, bintek, ataupun melalui pendidikan formal dan non-formal;
- ✓ Perlunya persamaan persepsi dalam melaksanakan semua program kegiatan agar segala pembangunan lingkungan hidup tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat;
- ✓ Meningkatkan Tunjangan Kinerja Daerah terutama dalam rangka koordinasi, pembinaan dan pengawasan Pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup.

PENGHARGAAN

Pada Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan Piagam Apresiasi Pembinaan Proklim dan Piagam Partisipasi Proklim yang diberikan kepada :

1. Desa Bungur Jaya Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat
2. Desa Tegalwaru Kecamatan Tegalwaru Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat
3. Dusun 1 Desa Margaluyu Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat
4. Dusun 2 Desa Neglasari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat



Piagam Partisipasi ProKlim

Diberikan Kepada :

**DESA BUNGURJAYA KECAMATAN PONDOKSALAM
KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT**

atas partisipasinya dalam mengembangkan :

LOKASI PROKLIM DENGAN KATEGORI PRATAMA

Jakarta, 11 Agustus 2024

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim,



Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A., IPU.





Diagam Partisipasi ProKlim

Diberikan Kepada :

**DESA TEGALWARU KECAMATAN TEGALWARU
KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT**

atas partisipasinya dalam mengembangkan :

LOKASI PROKLIM DENGAN KATEGORI PRATAMA

Jakarta, 11 Agustus 2024

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim,



Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A., IPU.





Piagam Partisipasi ProKlim

Diberikan Kepada :

**DUSUN 1 DESA MARGALUYU KECAMATAN KIARAPEDES
KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT**

atas partisipasinya dalam mengembangkan :

LOKASI PROKLIM DENGAN KATEGORI MADYA

Jakarta, 11 Agustus 2024

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim,



Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A., IPU.





Sertifikat

Diberikan Kepada :

**DUSUN 2 DESA NEGLASARI KECAMATAN DARANGDAN
KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT**

LOKASI PROKLIM KATEGORI UTAMA

yang telah aktif melakukan aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim secara terintegrasi sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap upaya Pengendalian Perubahan Iklim

Jakarta, 11 Agustus 2024

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.



C. INOVASI DAERAH

RAKSAPURI atau Gerakan Berkah Sampah untuk Purwakarta Istimewa adalah :

- ✓ Konsep Pengelolaan Sampah Mandiri
- ✓ Perubahan Paradigma dan Perubahan Perilaku Persampahan
- ✓ Pengelolaan Sampah terpadu dan Terintegrasi
- ✓ Membangun Ekosistem Tata Kelola Sampah di Wilayah Kabupaten Purwakarta

Prinsip Raksapuri pada dasarnya :

- Efektif Efisien Sumber Daya
- Nilai Ekologi Edukasi dan Ekososial
- Pemberdayaan Teknologi dan Jaringan
- Kebersamaan Langkah
- Sirkular Ekonomi
- Sinergitas dan Kolaborasi

D. SARAN

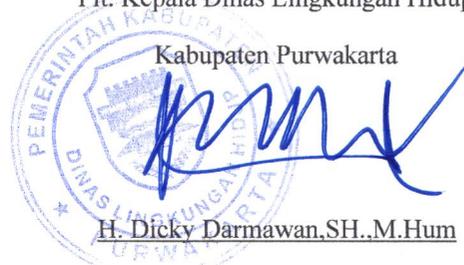
Berdasarkan pada hasil yang telah dilakukan, maka mempunyai saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan bagaimana untuk menciptakan sasaran anggaran yang jelas, komitmen organisasi yang kuat dan baik, pengendalian akuntansi yang efektif dan efisien, serta sistem pelaporan yang baik guna terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik yang mengarah ke efektivitasan penerapan SAKIP.
2. Diharapkan selanjutnya menggunakan metode lain seperti wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga meningkatkan kualitas data yang telah diperoleh.

Purwakarta, Desember 2024

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Purwakarta



H. Dicky Darmawan,SH..M.Hum

Nip. 19670502 199203 1 009